**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISALAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**KINERJA KANTOR PERTANAHAN DALAM PROGRAM
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN
PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**Desri Liana Sari
157310134**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KINERJA KANTOR PERTANAHAN DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN PELALAWAN”**. Ini penulis tulis dan diajukan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1).

Shalawat serta salam tidak lupa pula dihadiahkan kepada baginda rasul Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah paya menyebarkan ajaran agama islam serta mengorbankan segala jiwa dan raganya demi tegaknya Khalimatul Haq di jagat raya ini.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dan naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal tersebut penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan

bantuan dan dorongan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih terutama kepada:

1. Bapak Prof.Dr,Syafrinaldi,Sh.,MCL selaku Rektor Uuniversitas Islam Riau.
Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
2. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr.Ranggi Ade Febrian.,S.IP.,M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
4. Bapak Syaprianto.,S.Sos.,M.IP selaku dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis terutama pada proses pembimbing berlangsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak atau Ibu Dosen Falkultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universita Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan selama perkuliahan.
6. Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang telah memberikan izin pengambilan data serta informasi kepada penulis terkait dengan penelitian ini.
7. Teristimewa dengan ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang telah terkasih Ayahanda Zakaria dan

Ibunda Talima, atas curhatan kasih sayang, untaian do'a, serta motivasi tiada henti yang sangat besar yang tiada ternilai harganya yang diberikan selama ini.

8. Kepada sahabat saya Sinta Bella, Surni Lia Sari, Annisa Akhmalia yang berikan semangat, saran serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih juga teman-teman serperjuangan di kelas IP.B Angkatan 2015 atas dukungan yang telah diberikan selama ini, semoga persahabatan kita selalu terjalin walaupun jarak memisahkan.

Penulis mendo'akan jasa baik yang telah diberikan kepada yang disebutkan diatas dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal oleh Allah SWT, amiiin amiiin amiiin ya rabbal alamiin..

Akhirnya penulis, sekali lagi mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini dan dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca.

Pekanbaru, 18 Desember 2020

Penulis

Desri Liana Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	16
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	16
2. Konsep Manajemen Pemerintahan	19
3. Konsep Kebijakan dan Kebijakan Publik	20
4. Konsep Pelayanan	24
5. Konsep Asas Penyelenggaraan	25
6. Konsep Kinerja	29

B. Penelitian Terdahulu	40
C. Kerangka Pemikiran	42
D. Konsep Operasional	43
E. Operasionalisasi Variabel	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Key Informan dan Informan	47
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data	48
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	49

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum lokasi Penelitian	55
B. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan	58
C. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Pertanahan	59
D. Visi Dan Misi Kantor Pertanahan	65

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informasi	67
B. Kinerja Kantor Pertanahan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pelalawan	70
C. Hambatan-Hambatan dalam Kinerja Kantor Pertanahan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pelalawan	88

BAB VI PENUTUPAN

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR KEPUSTAKAAN	91
---------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

I.1	Target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	6
I.2	Penyelesaian Target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	6
II.1	Penelitian Terdahulu	41
II.2	Operasionalisasi Variabel Tentang Kinerja Kantor Pertanahan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pelalawan	45
III.1	Key Informan dan Informan	47
III.2	Jadwal Waktu Penelitian Tentang Kinerja Kantor Pertanahan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pelalawan	50
IV.1	Jumlah Penduduk dan Kecamatan di Kabupaten Pelalawan	58
V.1	Identitas Key Informan dan informan Penelitian Menulis Tentang kinerja Kantor Pertanahan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Pelalawan.....	67
V.2	Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	68
V.3	Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Umur	69
V.4	Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
II.1 Kerangka Pikiran Penelitian Kinerja Kantor Pertanahan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pelalawan.....	42
IV.1 Stuktur Organisasi Kantor Pertanahan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Pelalawan	58

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Skripsi Penelitian Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : Desri Liana Sari
NPM : 157310134
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Kinerja Kantor Pertanahan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pelalawan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apa bila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau sebelum memenuhi sebagian atau keseluruhan di atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru 18 Desember 2020

Desri Liana Sari

**KINERJA KANTOR PERTANAHAN DALAM PROGRAM
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN
PELALAWAN
ABSTRAK**

Oleh
Desri Liana Sari

Kata Kunci : Kinerja, Kantor Pertanahan, Program, Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara sebagai alat pengumpulan data serta melakukan observasi dan dokumentasi, dan menggunakan teknik Snowball Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Kinerja Kantor Pertanahan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pelalawan Di Pangkalan Kerinci, hal ini dapat dilihat dari 8 indikator yang telah penulis tetapkan yaitu Kuantitas Pekerjaan, Kualitas Pekerjaan, Pengetahuan mengenai pekerjaan, Gagasan, Kerjasama, Kesadaran, Pralarsa, Kualitas Pribadi. Faktor Pengambat dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu, Diharapkan Pegawai kantor lebih kreatif dan inovatif lagi, Semoga yang ikut kerjasama dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap lebih banyak lagi. Dan diharapkan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan tidak ada lagi yang terlambat masuk kerja.

**THE PERFORMANCE OF THE LAND OFFICE IN THE SYSTEMATIC
SYSTEM OF REGISTERED GROUND REGISTERED IN PELALAWAN
DISTRICT
ABSTRACT**

By

Desri Liana Sari

*Keywords : Performance, Lan Office, Program, Complete Systematic Land
Registration*

*This Study Aims To Determine The Level Of Perfor,Amce Of The Level Of
Performance Of The Pelalawan Regency Land Office Employees In The Complete
Systematic Land Type Of Research Is Descriptive Using Qualitative Methods With
Data Collection Techniquesn Carried Out By Interviewing As A Data Collection
Tool As Well As Making Observations And Documentation, And Using The
Snowball Sanpling Technique. The Results Showed That The Performance Of The
Land Office In The Complete Systematic Land Registration Program In
Pelalawan Regency In Pangkalan Kerinci , This Can Be Seen From The 8
Indicators That The Author Has Set, Namely Work Quantity, Quality Of Work,
Knowledge Of Work, Ideas, Work, Awareness, Initiative, Personal Qualities. The
Inhibiting Factors In Implementing This Policy Are. It Is Hoped That Office
Employees Will Be Even More Creative And Innovative. Hapefully More And
More People Are Involved In The Complete Systematic Lnad Registration
Program And It Is Hoped That The Pelalawan Regency Land Office Staff Will No
Longer Be Late For Work.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan dasar pembangunan nasional tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : “Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan nasional salah satunya pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Daerah sebagai area (wilayah) pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah yang merupakan suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh. Salah satu sumber daya tersebut adalah dalam bidang pertanian yang merupakan salah satu aspek pembangunan nasional.

Tanah merupakan hal yang sangat lah penting bagi kehidupan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia sangat bergantung terhadap tanah tempat manusia berpijak dan melangsungkan kehidupan.Tanah telah

menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi manusia serta berkembang menjadi masalah sektoral yang mempunyai dimensi ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Hal ini menyebabkan aspek pertanahan merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat penting bagi keberhasilan kehidupan manusia.

Begitu pentingnya aspek pertanahan bagi manusia selanjutnya akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan manusia akan tanah yang senantiasa meningkat seiring dengan laju pertumbuhan dan pembangunan di segala bidang. Dimana dilain hal ketersediaan tanah terbatas dan relative tetap, oleh karena itu pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah harus bisa mengakomodir semua permasalahan-permasalahan dalam masyarakat yang berkaitan dengan bidang pertanahan ini.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan utama pembangunan nasional dalam bidang pertanahan, yang menyatakan bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Undang-Undang Dasar 1945, telah menegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Demikian pula soal tanah, pemerintah berkewajiban memberikan kepastian hukum terhadap status tanah yang dikuasai masyarakat atau badan usaha.

Negara Indonesia telah menjamin hak rakyat-rakyatnya. Sebagai negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta

menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dengan tidak terkecuali.

Kepastian hukum penting untuk mengatur kehidupan masyarakat adil, dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah hukum yang dapat dipergunakan Negara dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Demikian pula mengenai lahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di dalam pasal 19 menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran sebagai berikut:

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukaan tanah.
- b. Pendaftaran hal-hal atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan adanya setiap jengkal tanah di mata hukum keagrariaan harus jelas status hak dan pemegang haknya, Misalnya, tanah Hak Milik jelas bukan tanah Negara dan berbeda kriterianya dengan tanah-tanah Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai. Begitupun siapa-siapa saja yang boleh menguasai atau memilikinya serta peruntukan penggunaannya mempunyai kriteria-kriteria yang berbeda. Tanah hak milik ataupun tanah hak-hak lainnya wajib didaftarkan di kantor-kantor pertanahan (BPN). Bukti bahwa tanah tersebut telah terdaftar adalah

sertifikat tanah yang sekaligus sebagai bukti penguasaan atau pemilikan pemegangnya atau tanah tersebut.

Tujuan pemerintah mengadakan pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat merupakan salah satu terwujud dari tujuan pendaftaran tanah yang dimaksud. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), melalui Pasal 19 mengamanatkan bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan bahwa sertipikat hak atas tanah merupakan bukti yang kuat mengenai suatu penguasaan atau pemilikan tanah.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjelaskan tujuan dan kegunaan pendaftaran tanah dan salah satu produknya bernama sertipikat hak atas tanah tersebut. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat, membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang dilakukan untuk seluruh objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia .

Atas dasar ketentuan di atas, perlu adanya tindakan pemerinatah serta kesadaran masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah demi mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Penyelenggaraan pendaftaran tanah akan menghasilkan suatu produk akhir yaitu berupa sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun dalam

pelaksanaannya, pasti ada hambatan, baik dalam pelaksanaan administrasi maupun dari masyarakat, itu sendiri. Masyarakat masih ada yang belum begitu mengerti akan pentingnya suatu pendataan tanah. Pemegang hak atau tanah berhak mendapatkan bukti otentik yang berkekuatan hukum tentang kepemilikan tanahnya dari lembaga yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai suatu objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Metode pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No.12 tahun 2017 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.

Pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan istilah sertifikasi tanah merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertipikat dapat menjadikan sertipikat tersebut sebagai modal pendamping usaha yang berdaya dan berhasil digunakan bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Tabel 1.1:Target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Tahun 2018 dan 2019.

No	Tahun	Target(Bidang)	
		Peta Bidang Tanah (PBT)	Sertipikat Hak Atas Tanah(SHAT)
1.	2018	5.500	5.500
2.	2019	8.000	8.000

Sumber Data:Program Strategi Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL) Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan.

Dari Tabel I.1 kita dapat mengetahui berapa target pada tahun 2018 dan 2019di Kabupaten Pelalawan yaitu sebanyak 5.500 dan 8.000 sertipikat.

Untuk pembuatan sertipikat tanah tidak di punggut biaya atau gratis dari BPN.Dan sedangkan masyarkat hanya dikenakan biaya pra PTSL. “biaya pra PTSL ini, mesti didudukan melalui peraturan bupati, tidak melebihi di angka RP 250.000 ribu. Kegunaanya, untuk pemberkasan beli patok, materai dan menyiapkan berkas-berkas di desa.

“Pekerjaan ini harus ada dukungan dari Pemda, terutama di tingkat kecamatan dan desa.Kita juga membutuhkan alat ukur serta kendaran layak untuk turun ke lokasi untuk memperlancar program ini”.

Dapat kita lihat dari penyelesaian target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019 dan 2020 dari tabel dibawah ini:

Table I.2:Penyelesaian Target Pendaftaran Tanah Sistemastis Lengkap (PTSL) di Tahun 2018 dan 2019.

No	Tahun	Realisasi(bidang)	
		Peta Bidang Tanah(PBT)	Sertipikat Hak Atas Tanah(SHAT)
1.	2018	5.500	3.500
2.	2019	8.000	5.320

SumberData :Program Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Ssistematis Lengkap(PTSL) Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam penyelesaian target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 dan 2019 Belum tuntas, sesuai dengan jatah di kabupaten pelalawan,

Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah) adalah Pola Pelayanan Pertanahan yang secara aktif dilakukan oleh BPN RI Bagi masyarakat dalam pengurusan pertanahan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, mempercepat proses, meningkatkan cakupan wilayah dan untuk menjamin pengurusan pertanahan tanpa perantara dengan cara mendekati melalui Kantor Pertanahan Bergerak (*Mobile Office*) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi (IT). Tahun 1990, diselenggarakan oleh presiden SBY.

Prona adalah Proyek Operasi Nasional Agraria, yaitu legalisasi aset tanah atau proses administrasi pertanahan mulai dari adjudikasi, pendaftaran tanah, hingga penerbitan sertifikat tanah. Program ini diselenggarakan dengan tujuan mempercepat pemenuhan hak dasar rakyat agar mendapat kepastian hukum kepemilikan tanah. Diatur dalam Kepmendagri No. 189 Tahun 1981, diselenggarakan oleh presiden SBY.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sebuah program yang berhasil dibuat Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. PTSL memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum mendaftarkan tanah miliknya yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Tahun 2016-2018, diselenggarakan oleh presiden Jokowi.

Perbedaan Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita), Program Nasional Agraria (Prona) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hanya sedikit ada perbedaan, jika Larasita dilakukan oleh BPN RI bagi masyarakat, Prona ditunjukkan pada masyarakat kurang mampu, dan sementara PTSL bersifat kolektif dalam satu desa.

A. Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (Larasita)

Secara langsung dilakukan oleh BPN RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) untuk masyarakat yang mengurus sertipikat, salah satunya untuk mempercepat proses pembuatan.

B. Program Nasional Agraria (PRONA)

Pendaftaran tanah sebagai penerima sertipikat dilakukan secara merata diseluruh desa dan kelurahan dalam kabupaten. Dalam Program Prona, satu tahun anggaran bisa disebar ke beberapa desa, bahkan hingga 10 desa. Program Prona, tidak seluruh bidang tanah yang tidak bersertipikat dalam satu desa diberikan bantuan tetapi secara bertahap.

C. Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)

Pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah melalui desa per desa, Kabupaten per Kabupaten, serta kota per kota. Dana Program PTSL terpusat di satu desa, Sedangkan PTSL, seluruh tanah dalam daerah tersebut yang belum memiliki sertipikat akan dibuatkan.

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui perpres No. 2 tahun 2015 yang telah di tanda tangani tanggal 8 januari 2015. RPJMN 2015-2019

ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian atau lembaga dalam menyusun rencana srateges kementerian atau lembaga (restara/KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun atau menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan di jabarkan kedalam rencana kerja pemerintahan (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara (RAPBN).

Menurut pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengn itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Tahap pelaksanaan program PTSL adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan persiapan;
2. Penetapan lokasi kegiatan PTSL;
3. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
4. Penyuluhan;
5. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
6. Pemeriksaan tanah;
7. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;
8. Penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;
9. Pembukuan dan penerbitan Sertifikat Ha katas Tanah; dan
10. Penyerahan Sertifikat Hak atas Tanah;

Dalam hal pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2017 peserta atau yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran tanah meliputi :

1. Warga Negara Indonesia, bagi perorangan.
2. Masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Perumahan Sederhana.
3. Badan hukum keagamaan dan Badan Hukum sosial yang sesuai antara penggunaan dengan peruntukan tanahnya.
4. Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Veteran, Pensiunan Negara sipil, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Suami/Istri/Janda/Duda/Verteran/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit.
7. Nazhir (Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif) atau
8. Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 12 Tahun 2017 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Tujuan adalah sesuatu yang ingin di dapatkan/dicapai oleh kelompok orang yang bekerja sama tersebut dan biasanya berupa kebutuhan bersama yang tidak bisa diraih seorang diri (Syafri:2012). Tujuan merupakan Sasaran yang hendak di capai oleh seseorang atau organisasi dalam menjalankan kegiatan sebagai indikator dalam mencapai keberhasilan.

Tujuan program PTSL. Menurut Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hakatas Tanah masyarakat secara pasti,

seederhana, cepat, lancar, aman, adil, Merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Obyek pendaftaran sistematis lengkap(PTSL), adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017, obyek PTSL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset Pemerintah/ pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.

Obyek PTSL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi baik bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam melaksanakan kegiatan PTSL.

Syarat-syarat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yaitu :

- a. Mendaftar diri secara langsung melalui desa/kelurahan.
- b. Memperoleh blanko surat pernyataan pendaftaran.
- c. Melengkapi syarat-syarat yang diperlukan Syarat-syaratnya, antara lain;
 1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) rangkap 3.
 2. Fotocopy SPPT PBB tahun 2018 (tahun berjalan) rangkap 3.
 3. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan diketahui oleh Lurah (ditanda tangani oleh 2 orang Jiran Tetangga oleh fotocopy KTP Jiran Tetangga).
 4. Surat Alas Hak Surat Camat/ Surat Lurah (fotocopy rangkap 3).
 5. Materai 6000 (6 rangkap)
 6. Memasang patok batas tanah secara permanen.

- d. Pengukuran tanah.
- e. Mengumpulkan berkas asli.
- f. Memperoleh surat bukti tanda terima berkas.
- g. Jangka waktu pemrosesan berkas-berkas 45hari setelah pengukuran.
- h. Masyarakat diminta datang langsung ke kantor Badan Pertanahan (BPN) untuk tahap akhir pengurusan.
- i. Pengecekan bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- j. Memperoleh sertifikat tanah.

Sumber pembiayaan PTSL, dapat berasal dari :

- a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kemaenterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, baik berupa anggaran khusus program PTSL maupun anggran PRONA, transmigrasi, redistribusi tanah landreform, dan program pensertipikatan Ha katas Tanah.
- b. Daftar Isilah Program Anggran (DIPA) kementerian/lembaga pemerintah liannya.
- c. Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota dan Dana Desa.
- d. *Corporate Social Responsibility*(CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta.
- e. Dana masyarakat melalui Sertipikat Masal Swadaya (SMS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;atau
- f. Penerimaan lain yang sah berupa hiba (*Grant*), pinjaman (*Loan*) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Sertipikat berarti tanda atau surat keterangan pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian. Sedangkan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibuka dalam buku tanah yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan pimpinan oleh Kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 63 Tahun 2013). Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan sejauh ini masih mendapatkan sorotan yang cukup tajam dari masyarakat terutama masyarakat yang melakukan pengurusan sertipikat.

Pada kenyataannya masih terdapat permasalahan-permasalahan mengenai Kinerja Pegawai Kantor Petanahan Kabupaten Pelalawan, fenomena-fenomena yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan sebagai berikut :

1. Masih lemahnya Kinerja Kantor Pertanahan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam menyelesaikan sertipikat.
2. Masih rendahnya kedisiplinan pegawai kantor pertanahan Kabupaten Pelalawan dalam tingkat kehadiran masuk jam kerja.

Berdasarkan dari fenomena dan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul penelitian **“Kinerja Kantor Pertanahan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pelalawan”**.

B. Rumusan Masalah

Pemerintah telah menetapkan bahwa setiap orang memiliki tanah diwajibkan untuk memiliki sertipikat tanah. Sertipikat sangat penting sekali terutama sebagai bukti atas hak milik tanah, biar tidak ada kesalah pahaman dan pertengkaran. Sudah ada sertipikat kita sudah tidak akan takut lagi di ambil tanah hak milik kita karena sudah ada sertipikat atas nama kita.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : **“Bagaimanakah Kinerja**

Pegawai Kantor Pertanahan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pelalawan??”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Kantor Pertanahan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Di Kantor Pertanahan dalam proses Kinerja Kantor Pertanahan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan berguna untuk :

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi penelitian khususnya ilmu pemerintahan.
- b. Manfaat praktis, sebagi saran dan bahan masukan yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya terhadap penelitian sejenis dan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan menurut Syafiie dalam bukunya *Kepimpinan Pemerintahan Indonesia* (2003:3) berasal dari kata “Perintah” yang berarti melakukan pekerjaan menyeruh, yang berarti memiliki 4 unsur yaitu terdiri dari dua pihak unsur yang diperintah yaitu rakyat, unsur pemerintah itu sendiri dan antaranya ada hubungan setelah mendapat awalan “Pe” menjadadi pemerintah yang berarti badan organisasi mengurus setelah ditambah akhiran “An” menjadi pemerintahan dan perbuatan cara atau perihal.

Senada dengan Syafiie, Ndaraha dalam bukunya (2003:6) menyatakan bahwa Pemerintahan adalah organ yang berwenang memperoleh pelayanan public dan berwajib memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan maksud dari hubungan pemerintahan itu adalah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah.

Menurut Syaffie (2005:23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislative), kepemimpinan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahan) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Menurut Rasid dalam Labolo (2007:7) manjelaskan bahwa Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana dan

layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (“sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan”, jadi normatif, dan ideal,), kemudian dari sudut yang kedua yaitu bagaimana nyatanya (“pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan”, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empirik, dan seimbang). Berdasarkan definisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup Ilmu Pemerintahan. Ruang lingkup itu terdiri dari;

1. Yang-diperintah.
2. Tuntutan yang-diperintah (jasa-publik dan layanan-civil).
3. Pemerintah.
4. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah.
5. Hubungan pemerintahan.
6. Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
7. Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian itu.
8. Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
9. Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman?

Menurut Wasistiono (2015:95) mengemukakan bahwa ilmu pemerintahan mempunyai objek materi sebagai berikut:

1. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana organisasi tertinggi suatu Negara, yakni pemerintah berhubungan dengan rakyatnya dalam kaitan hak dan kewajibannya yang seimbang. Pemerintah mempunyai kewajiban dan hak kepada warga Negara. Sebaliknya warga Negara mempunyai kewajiban dan hak kepada negara.
2. Pola hubungan yang dilaksanakan antara pemerintah dengan rakyatnya akan sangat tergantung pada bentuk negara dan sistem politik yang dianutnya. Pada negara demokratis dengan asas good governance, hubungan antara rakyat dengan pemerintahannya bersifat hierarkhis. Antara rakyat, sektor pemerintah, dan sektor swasta berkedudukan sejajar dengan fungsi yang berbeda. Pada negara dengan sistem pemerintahan otoriter, hubungan rakyat dengan pemerintahannya bersifat hierarkhis. Pemerintah dalam posisi superior menguasai dan memerintah rakyat, pada sisi lain rakyat diposisikan sebagai pihak yang diperintah.
3. Konteks kewenangan maksudnya adalah bahwa yang dijalankan oleh pemerintah adalah sesuatu yang sah secara hukum.

Menurut Ndraha(2011:5) Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil. Tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai sovereign, sebagai pelanggan, konsumen yang tidak berdaya, dan sebagainya.

Berdasarkan teori-teori pemerintahan yang di jelaskan diatas, maka dikuatkan dan disimpulkan menurut Kitab Suci Al-Qur'an dalam Syafie

(2013:12) menjelaskan bahwa defenisi Pemerintahan adalah segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, melang dari buruk, itulah orang yang beruntung.

2. Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut George Terry (dalam Syariie,2013:126) Manajemen adalah suatu proses khusus yang berdiri dari suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia lainnya.

Menurut Salam (2004:10) Manajemen adalah kegiatan organisasi sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efesien. Dengan demikian manajemen melibatkan berbagai elemen organisasi baik internal, eksternal, sarana dan prasarana alat maupun fungsi dan kedudukan (jabatan) dalam organisasi yang diatur sedemikian rupa dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Syafiie (2005:13) Manajemen adalah suatu proses yang umum yang ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun milliter dalam ukuran besar maupun kecil.

Perencanaan dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan organisasi.Mengendalikan pemerintah dilakukan semenjak dijalankan sebagai fungsi komunikasi pemerintah, koordinasi pemerintah, dan kepemimpinan pemerintah.Dengan demikian organisasi pemerintah maupun swasta memerlukan publik manajemen agar roda pemerintahan yang berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Menurut Moenir (2004; 87) Manajemen adalah luas ataupun sempit. Manajemen dalam arti luas adalah proses penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya manusia dan bukan manusia, sedangkan dalam arti sempit manajemen dapat dirumuskan sebagai kegiatan dari kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001:9) adalah sebagai berikut:

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (organisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)
- d. *Motivating* (motivasi)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Berdasarkan pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa manajemen merupakan kumpulan dari usaha-usaha kelompok untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, manajemen sangat penting dalam pemerintahan dimana masing-masing subsistem saling berintegrasi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan pemerintahan, bekerjasama dengan swasta dan masyarakat umum untuk tercapainya good governance.

3. Konsep Kebijakan dan Kebijakan Publik

Kebijakan publik Menurut Prewitt (dalam Agustino, 2008;6) adalah sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari yang mematuhi keputusan tersebut.

Selanjutnya Menurut R.Dye (dalam Agustino, 2008;7) kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

Nugroho (2004;101) perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Kemudian Menurut pendapat Keban (2004;56) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah, kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah.

Selanjut Woll (dalam Santoso, 2004;20) merumuskan kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Kebijakan ditulis dalam bahasa Inggris dengan Policy, sedangkan kebijaksanaan di tulis bahasa Inggris dengan Wisdom. Perbedaannya adalah kalau kebijakan berasal dari atasan tertinggi, misalnya pemerinatah pusat, maka pada tingkat pimpinan daerah atau yang setingkat berada dibawahnya dapat mengubahnya sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan secara empiris, menurut Syafiie (2013;355).

Kemudian Menurut Ndraha (2011;493) kebijakan dalam Kybernology dan dalam konsep kebijakan pemerintahan adalah sistem nilai kebijakan dan

kebijaksanaan diatas yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan.

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu terapan (Freeman, 2006). Pengertian kebijakan publik oleh para pakar didefinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya. Thoha (2012) memberikan penafisiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat.

Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut Wahab (2010) menyatakan bahwa:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acara dan kebetulan;
- b. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri;
- c. Kebijakan publik berkenaan dengan aktifitas/ tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu;
- d. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negative dalam arti

merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, Islamy (2010) mengemukakan pengertian kebijakan publik, sebagai berikut:

- a. Kebijakan negara dalam bentuk awalnya berupa ketetapan tindakan tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- c. Kebijakan negara yang baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Kebijakan negara harus senantiasa ditujukan bagi pemenuhan kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan (Dye dalam Nurcholis, 2007; 264).

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merialisasikan tujuan negara yang bersangkutan. (Nugroho, 2008;55). Dari hal tersebut diketahui bahwa kebijakan publik dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Kebijakan publik bersifat makro atau umum
2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro. (Nugroho, 2008;62)

4. Konsep Pelayanan

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Pada dasarnya setiap

permasalahan pasti memiliki landasan teori pendukung atau penghubung untuk memperkuat masalah. Oleh sebab itu penulis akan menyajikan beberapa teori sehingga dapat membantu proses pemecahan masalah penelitian yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

Menurut Samara Lukman yang dikutip oleh Sinambela (2014;5), pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara dalam kamus besar Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani.

Dalam pengertian lain, karena itu merupakan proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh organisasi dalam masyarakat.

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan diatas bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.

Menurut Hardiyansah (2011: 11) mendefinisikan bahwa “ pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain”.

5. Konsep Asas Penyelenggaraan

Dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dasar tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan pusat, karena pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dengan demikian asas penyelenggaraan pemerintahan berlaku juga dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah , termasuk asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Menurut inu Kencana Safei, menyebutkan asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Dengan demikian yang menjadi asas pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti idiologi suatu bangsa, falsafa hidup dan kontitusi yang membentuk sistem pemerintahan. Begitu pulak talizi dalam inu Kencana Safei menyebutkan pengertian asas-asas pemerintahan yang berlaku secara umum sebagai berikut : secara umum dapat dikatakan bahwa asas-asas pemerintahan tercantum didalam pedoman-pedoman, peraturan-peraturan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pemerintahan harus berpedoman pada asas atau prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan, karena wilayah Negara republik Indonesia sangat luas serta penduduk beragam sehingga pemerintahan yang baik dilaksanakan secara seragam untuk wilayah Negara republik Indonesia. Tidakan pemerintah mengeluarkan keputusan tata usaha Negara yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, asas-asas pemerintahan yang baik merupakan sendi dalam mewujudkan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip dari asas ini dalam rumusan peraturan yang diwujudkan dari cita-cita hukum.

Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas asas musyawarah kekeluargaan sebagai pedoman yang berakibat saling bantu membantu, saling

menghormati dan saling memberikan perlindungan dalam melaksanakan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Kedaulatan rakyat mempedomani bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat yang tidak diganggu gugat oleh siapapun. Kedaulatan rakyat merupakan pencerminan dari prinsip-prinsip demokrasi dalam perwujudan kebebasan berpendapat, berbicara dan berpartisipasi dalam pemerintahan dan sebagainya. Demokrasi agar tidak menimbulkan sikap arogan, anarkhis dan penyalahgunaan wewenang diperlukan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa asas umum penyelenggaraan negara dalam ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), ditambah asas efisiensi dan efektivitas sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

- b. Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- c. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Asas proporsional, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
- f. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pendapat Prajudi Atmosudirdja S, asas efisiensi adalah sasaran wajib dikejar mungkin dengan kehematan biaya atau pencapaian produktivitas tinggi. Sedangkan efektivitas adalah kegiatan harus mengenai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah reformasi merupakan persoalan yang sangat penting untuk untuk menciptakan pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan bertanggungjawab dalam kerangka demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai hukum yang kerkeadilan. Penyelenggaran pemerintahan daerah diberikan kebebasan wewenang dalam mengatur dan mengurus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebebasan tindakan pemerintahan daerah bukan kebebasan tanpa dibatasi dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi kebebasan dalam menjalankan tindakan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam penyelenggaran pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang dilakukan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ada tiga prinsip dasar dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

a. Transparansi

Transparansi adalah upaya untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah dengan warga masyarakat melalui penyediaan sasaran informasi yang mudah diproleh masyarakat.

b. Partisipasi

Partisipasi masyarakat mendorong bagi setiap warga masyarakat untuk melaksanakan haknya menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, demi untuk kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga proses pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan asas pemerintahan rakyat.

Dengan demikian, maka pemerintah menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk melakukan komunikasi bagi masyarakat dalam menyalurkan partisipasi aktifnya.

c. Akuntabilitas

Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan secara periodik melalui badan perwakilan rakyat yang telah dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, dalam tatanan pemerintah pusat, Presiden sebagai penanggungjawab pemerintahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Konsep Kinerja

Setiap pegawai ditepatkan, diberikan tugas dan kepercayaan untuk mengurus suatu unit organisasi tertentu, dan diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan dan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kinerja menurut Mangkunegara (2005;9) Kinerja pada dasarnya dari kata *Job Performance Atau Actual Performance* (Prestasi kerja atau prestasi kerja yang dicapai sesungguhnya oleh seseorang). Adapun pengertian kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang.

Menurut Hasibuan (2001;32) mengemukakan kinerja (prestasi kerja adalah suatu kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan waktu. Selanjutnya Bernadin (dalam Triton, 2007;8) kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang, kinerja adalah suatu perbuatan, sesuatu prestasi suatu pameran umum keterampilan.

Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruk dan merosotnya kinerja pegawai sehingga perusahaan atau instansi menghadapikrisis yang sangat serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat pada mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot, untuk mengetahui seberapa berhasilnya kinerja pegawai suatu organisasi di perlukan penilaian kinerja.

Penilaian kinerja pegawai menurut Meggison (dalam Mangkunegara, 2005;9) adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang pegawai melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Tolak ukur kinerja organisasi publik berkaitan dengan ukuran keberhasilan yang dicapai oleh organisasi tersebut. Satuan ukuran keberhasilan yang relevan digunakan adalah efisiensi pengelolaan dana dan tingkat kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada public. Mardiasmo (dalam Tangkilisan, 2005;196).

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan akan baik bila dia mempunyai keahlian (skill) yang tinggi, bersedia bekerja karena digaji atau diberikan upah sesuai dengan perjanjian, mempunyai harapan (expectation) masa depan lebih baik. Tujuan kinerja adalah

Me-reward kinerja sebelumnya (*To Reward Past Performance*) dan untuk memotivasi demi perbaikan kinerja pada waktu yang akan datang (*To Motivation Future Performance Impowement*), informasi-informasi yang diperoleh dari

penilaian kinerja ini dapat digunakan untuk kepentingan pemberian gaji, promosi, pelatihan dan penempatan pada tugas-tugas tertentu (Gomes. 2003;135).

Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja pegawainya di Kabupaten Pelalawan yang berdasarkan deskripsi perilaku spesifik, maka ada beberapa dimensi atau kriteria yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut Gomes (2003;142) diantaranya adalah;

1. *Quantity Of Work* yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan.
2. *Quality Of Work* yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.
3. *Job Knowledge* yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya.
4. *Greativeness* yaitu keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul.
5. *Cooperation* yaitu kesadaran untuk bekerjasama dengan orang lain (sesama anggota organisasi).
6. *Dependability* yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian pekerjaan.
7. *Initiative* yaitu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggungjawabannya.
8. *Personal qualities* yaitu menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah tamahan dan integritas pribadi.

Dari beberapa pemaparan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaannya pegawainya dan kinerja organisasi serta untuk kebutuhan pelatihan kinerja secara tepat dan pemberian tanggungjawab terhadap pegawainya tersebut.

Tujuan penilaian kinerja secara umum dapat dibagi menjadi dua (Gomes, 2003:135), yaitu:

1. Untuk memberikan penghargaan terhadap kinerja sebelumnya (*To Reward Past Performance*)

2. Untuk memotivasi perbaikan kinerja pada waktu yang akan datang
(*To Motivate Future Performance Improvement*)

Informasi-informasi yang diperoleh dari penilaian kinerja tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pemberian gaji, kenaikan gaji, promosi, dan penempatan-penempatan pada tugas-tugas tersebut.

Penilaian kinerja merupakan faktor penting untuk suksesnya manajemen kinerja. Menurut Mondy (2008:257) data yang dihasilkan dari penilaian kinerja bisa memiliki nilai potensi untuk hamper semua bidang fungsional sumber daya manusia, di antaranya untuk hamper semua bidang fungsional sumber daya manusia , di antaranya untuk perencanaan sumber daya manusia, perekrutan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, program kompensasi, hubungan kearyawanan internal dan penilaian potensi karyawan.

Tujuan penelitian kinerja pegawai adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM organisasi. Secara lebih spesifik. Menurut chayani (2005:93) Tujuan dan penilaian Kinerja meliputi;

1. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja.
2. Sebagai umpan balik, yaitu mencatat dan mengakui hasil kerja seseorang pegawai, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang baik.
3. Memberikan peluang kepada pegawai untuk mendiskusikan keinginan, aspirasi dan meningkatkan kepedulian terhadap kirier atau terhadap pekerjaannya yang diembannya sekarang.

Sedangkan manfaat dari penilaian kinerja karyawan menurut Mengkunegara (2005;11), meliputi;

1. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai sehingga dicapai dengan baik,
2. Sebagai dasar untuk menilai program latihan dan keaktifan jadwal kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja dan pengawasan,
3. Sebagai kriteria menentukan seleksi dan penempatan pegawai.

Dalam melaksanakan manajemen kinerja yang selayaknya juga dapat didefenisikan siapa saja pegawai yang mempunyai potensi untuk dikembangkan karirnya dengan dicalonkan untuk menduduki jabatan-jabatan yang tanggung jawabnya lebih besar pada masa yang akan datang. Pembinaan pegawai, pelaksanaan manajemen kinerja juga dapat menjadi sarana untuk meneliti hambatan yang terjadi pada pegawai serta untuk meningkatkan prestasinya dalam organisasi.

1. Kuantitas Pekerjaan

Kuantitas adalah tolak ukur suatu hal yang tertuju pada jumlah atau nilai yang dapat dihitung secara pasti. Misalnya jumlah peserta suatu pertemuan, jumlah karyawan, dan lain sebagainya. Kuantitas biasanya selalu dibandingkan dengan kualitas. Jika disandingkan dengan kata kualitas, kata kuantitas memiliki makna yang lebih buruk dari kualitas. Banyak yang menggunakan kata ini pada kalimat “percuma kuantitasnya banyak namun tidak berkualitas”.

Menurut Thompson (1990), kuantitas adalah kualitas sesuatu hal yang terbentuk dari proses pengukuran.

Sedangkan menurut Wungsu & Brotoharsojo (2003), kuantitas adalah segala macam bentuk satuan ukuran yang berhubungan dengan jumlah hasil kerja yang dapat dinyatakan ukuran angka atau padanan angka lainnya.

Dan sedangkan menurut Mangkunegara (2009), kuantitas adalah ukuran seberapa lama seorang karyawan dapat bekerja dalam satu harinya.

Dari definisi kuantitas di atas, bisa disimpulkan bahwa kuantitas selalu berhubungan dengan jumlah. Kuantitas secara umum memiliki beberapa macam, diantaranya kuantitas penduduk, kuantitas kerja, dan kuantitas produk. Berikut masing-masing penjelasannya:

1. Kuantitas Penduduk

Kuantitas penduduk adalah suatu hal yang berkaitan dengan jumlah penduduk. Dengan demikian, kebutuhan akan tenaga kerja akan segera terpenuhi dengan adanya jumlah penduduk yang memadai, sehingga tidak perlu mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri.

Sedangkan pengertian lainnya, kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk yang diukur berdasarkan perbedaan antara jumlah yang lahir, mati dan berpindah tempat tinggal.

Sedangkan kualitas penduduk adalah tingkat atau taraf hidup penduduk di suatu wilayah yang dapat memenuhi aspek kebutuhan hidup mereka, seperti meliputi pemenuhan kebutuhan pandangan, sandang, pakaian perumahan, kesehatan, pendidikan, dan produktivitas.

2. Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja adalah jumlah kerja yang dilakukan oleh seseorang pegawai atau karyawan dalam suatu periode tertentu. Hal ini bisa dilihat

dari hasil kerja pegawai atau karyawan dalam kerja penggunaan waktu tertentu dan kecepataannya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, kuantitas kerja dapat dilihat dari jumlah kerja penggunaan waktu.

3. Kuantitas Produk

Kuantitas produk adalah jumlah suatu produk yang diproduksi, dikonsumsi, dan digunakan. Kualitas produk tentunya perlu dipertimbangkan dan juga disesuaikan dengan banyaknya permintaan. Disamping itu, kuantitas produk yang banyak juga harus diimbangi oleh kualitas.

2. Kualitas Pekerjaan

Kualitas adalah taraf/ tingkat baik buruknya/derajat sesuatu. Menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003:57), kualitas dinyatakan dalam suatu ukuran yang dapat dipadang dengan angka.

Mutu seorang karyawan/pegawai dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya meliputi kesesuaian, kerapian dan kelengkapan. (Wilson dan Heyel:1987).

Ketepatan yang dimaksud di sini adalah ketepatan adanya kesesuaian antara rencana kerja dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Kelengkapan adalah kelengkapan ketelitian dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan kerapian adalah kerapian dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.

Kualitas kerja yang mengacu pada kualitas sumber daya manusia seperti pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki seorang karyawan. (Matutuna;2001).

Dapat disimpulkan bahwa kualitas kerja yang rendah akan membuat produktivitas menurun, dan sebaliknya jika kualitas kerja karyawan tinggi maka hal tersebut akan meningkatkan tingkat produktivitas.

3. Pengetahuan mengenai pekerjaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Adapun pengetahuan menurut beberapa ahli adalah:

1. Menurut Pudjawidjana (1983), pengetahuan adalah reaksi dari amnesia atas rangsangannya oleh alam sekitar melalui persetuhan melalui objek dengan indera dan pengetahuan merupakan hasil yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan sebuah objek tertentu.
2. Menurut Ngatimin (1990), pengetahuan adalah sebagai ingatan atas bahasa-bahasa yang telah dipelajari dan mungkin ini menyangkut tentang mengikat kembali sekumpulan bahan yang luas dari hal-hal yang terperinci oleh teori, tetapi apa yang diberikan menggunakan ingatan akan keterangan yang sesuai.
3. Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Dari beberapa pengertian pengetahuan di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari

persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan dan berfikir yang menjadi dasar manusia Pius dalam kamus bahasa Indonesia (2001) pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui dan proses belajar.

4. Gagasan

Gagasan/ide adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Artinya sama dengan cita-cita. Gagasan dalam kajian Filsafat Yunani maupun Filsafat Islam menyangkut suatu gambaran imajinal utuh yang melintas cepat.

Menurut Wikipedia, Gagasan atau ide adalah istilah yang dipakai baik secara populer maupun dalam bidang filsafat dengan pengertian umum “atau “pengertian”.

Gagasan tentang sendok, muncul dalam bentuk sendok yang utuh di pikiran. Selama gagasan belum dituangkan menjadi suatu konsep dengan tulisan maupun gambar yang nyata, maka gagasan masih berada di dalam pikiran. Gagasan menyebabkan timbulnya konsep, yang merupakan dasar bagi segala macam pengetahuan, baik sains maupun filsafat. Sekarang banyak orang percaya bahwa gagasan adalah suatu kekayaan intelektual seperti hak cipta atau paten.

5. Kerjasama

Menurut Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson (2014, h. 164) kerjasama adalah pengelompokan yang terjadi di antara makhluk-makhluk hidup yang kita kenal. Kerja sama atau belajar bersama adalah proses beregu (berkelompok) dimana anggota-anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat. Ruang kelas suatu tempat yang sangat baik untuk

membangun kemampuan kelompok (tim), yang anda butuhkan kemudian di dalam kehidupan.

Kerjasama dapat menghilangkan hambatan mental akibat terbatasnya pengalaman dan cara pandang yang sempit. Jadi akan lebih mungkin menemukan kekuatan dan kelemahan diri, belajar untuk menghargai orang lain, mendengarkan dengan pikiran terbuka, dan membangun persetujuan kerjasama. Dengan bekerjasama kelompok kecil akan mampu mengatasi berbagai bentuk rintangan, bertindak mandiri dan dengan penuh rasa tanggung jawab, mengandalkan bakat atau pemikiran setiap anggota kelompok, mempercayai orang lain, mengeluarkan pendapat dan mengambil keputusan.

Menurut Robert L. Clitrap dalam Roestiyah (2008, h. 15) menyatakan “kerjasama adalah merupakan suatu kegiatan dalam kelompok untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas secara bersama-sama”, dalam kerjasama ini biasanya terjadi interaksi antar anggota kelompok dan mempunyai tujuan yang sama untuk dapat dicapai bersama-sama.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah keinginan untuk bekerja secara bersama-sama dengan orang lain secara keseluruhan dan menjadi bagian dari kelompok dalam memecahkan permasalahan.

6. Kesadaran

Menurut Hasibuan (2012;193), “kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , “kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengenai, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang“.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan kesadaran adalah kondisi dimana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankannya.

7. Prakarsa

Daya untuk melakukan suatu pekerjaan tanpa menunggu intervensi atau suruhan orang lain. Karyawan yang mempunyai inisiatif adalah karyawan yang proaktif dan tidak pasif yang diam menunggu perintah atasan. Pegawai yang berinisiatif tidak akan menunggu perintah dahulu untuk berbuat, mereka berbuat melebihi dari yang diperintahkan. Selalu mencari terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan hasil pekerjaan. Orang-orang seperti ini sangat disukai dalam bidang apapun yang digeluti karena hasil pekerjaan mereka melebihi dari yang diharapkan.

8. Kualitas Pribadi

Menurut Koentjaraningrat Kepribadian adalah beberapa ciri watak yang diperlihatkan seseorang secara lahir, konsisten, dan konsekuen. Setiap manusia melakukan proses sosial. Proses sosialisasi berlangsung selama manusia masih hidup didunia ini. Kepribadian seseorang individu dapat terbentuk dalam bertingkah laku, sehingga individu memiliki identitas khusus yang berbeda dengan orang lain.

Sedangkan menurut Theodore R Newcombe ahli sosiologi mengatakan kepribadian ialah organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang latar belakang terhadap perilaku.

B. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut penelitian perlu dijadikan bagian terdiri adalah penelitian dahulu yang sangat relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah Kinerja.

Tabel: II.1:Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Karina Gita Sahprada(2018)	Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Bandar Lampung	Menggunakan indikator yang sama	Konsep Kinerja yang dipakai berbeda, kemudian dalam jumlah populasi dan sampel juga berbeda
2.	Nadila Maysila Herdarezki(2018)	Optimalisasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Kabupaten Karanganyar	Sama-sama menggunakan konsep kinerja pada studi kepustakaan	Perbedaanya adalah pada kerangka pemikiran yaitu menggunakan pelayanan public
3.	Taufik Imam Ashari (2018)	Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL) Di Kabupaten Lampung Selatan	Tipe penelitian sama-sama menggunakan kualitatif deskriptif.	Teknik pengumpulan data 1.Wawancara 2.Dokumentasi 3.Observasi

Sumber Data : Modifikasi Penulisan,2020.

C. Kerangka Pemikiran

Dari penjelasan diatas, dapat diambil suatu kesimpulan untuk dijadikan kerangka pikiran bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja. Untuk lebih jelas, gambaran hubungan variabel penelitian, teori yang dijadikan indikator, akan ditampilkan pada gambar berikut ini:

Gambar II.1: Kerangka Pikiran Penelitian Kinerja Kantor Pertanahan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pelalawan.

SumberData : Modifikasi Penulis, 2020.

D. Konsep Operasional

1. Kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Kantor Pertanahan adalah lembaga pemerintahan nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan adalah instansi departemen pertanahan Kabupaten/Kota di bidang urusan BPN dalam wilayah kecamatan.
4. Kuantitas Pekerjaan (*Quantity Of Work*) yaitu jumlah kerja yang dilakukan oleh pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dalam satu tahun.
5. Kualitas Pekerjaan (*Quality Of Work*) yaitu kualitas kerja yang dicapai oleh Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan berdasarkan syarat-syarat kesuaian dan kesiapannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
6. Pengetahuan mengenai pekerjaan (*Job Knowledge*) yaitu luasnya pengetahuan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan mengenai pekerjaan dan keterampilannya.
7. Gagasan (*Greativeness*) yaitu gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-tindakan oleh Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

8. Kerjasama (*Cooperation*) yaitu kesadaran dari Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan untuk bekerjasama dengan orang lain atau pegawai yang lain dalam satu organisasi untuk menyelesaikan tugasnya.
9. Keserahan (*Depandability*) yaitu kesadaran yang dimiliki oleh Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dalam hal kehadiran dan penyelesaian pekerjaan.
10. Prakarsa (*Initiative*) yaitu semangat yang dimiliki oleh Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawabnya.
11. Kemampuan pribadi (*Personal Qualities*) yaitu menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah tamahan dan integritas pribadi yang dimiliki oleh Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan.

E. Operasionalisasi Variabel

Untuk mempermudah dan memahami arah penelitian tentang Kinerja Kantor Pertanahan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Pelalawan:

Tabel II.2 :Operasionalisasi Variabel Tentang Kinerja Kantor Pertanahan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pelalawan

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
<p>Kinerja adalah mempunyai tujuan <i>Me-Rewaed</i> kinerja sebelumnya (<i>To Reward Past Performance</i>) dan untuk memotivasi demi perbaikan kinerja pada waktu yang akan datang (<i>To Motivate Future Performance Improvement</i>). Informasi yang diperoleh dari penilaian kinerja ini dapat digunakan untuk kepentingan pemberian gaji, promosi, pelatihan dan penempatan pada tugas-tugastertentu. Gomes (2003;135)</p>	<p>Kinerja Kantor Pertanahan Dalam Program Pendaftaran n Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Pelalawan</p>	<p>Kuanlitas Pekerjaan (<i>Quantity Of Work</i>)</p>	<p>a. Jumlah Pekerjaan b. Beban Kerja</p>
		<p>Kualitas Pekerjaan (<i>Quality Of Word</i>)</p>	<p>a. Ketelitian Kerja b. Tingkat Kesalahan</p>
		<p>Pengetahuan mengenai pekerjaan (<i>Job Knowledge</i>)</p>	<p>a. Kemampuan Pegawai b. Pengetahuan Tentang Pekerjaan c. Kesungguhan Pegawai</p>
		<p>Gagasan (<i>Greativenes</i>)</p>	<p>a. Gagasan b. Penyelesaian Persoalan</p>
		<p>Kerjasama (<i>Cooperation</i>)</p>	<p>a. Kemampuan Bekerja Sama b. Kemampuan Penganmbilan Keputusan</p>
		<p>Kesadaran (<i>Depandability</i>)</p>	<p>a. Kejujuran b. Kehadiran c. Kedisiplinan</p>
		<p>Prakarsa (<i>Initiative</i>)</p>	<p>a. Tanggung Jawab b. Kreativitas</p>
		<p>Kualitas Pribadi (<i>Personal Qualities</i>)</p>	<p>a. Sikap atau perilaku b. Etika c. Kepribadian</p>

Sumber: Data Olahan Penelitian 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu sasaran yang dapat diamati sebagaimana terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau memperhatikan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin, jika itu informasi maka itu direkam (dicatat) sebagaimana ia keluar dari sumbernya (Ndraha. 1997,23).

Disini penelitian langsung melakukan penelitian di Kantor Petanahan Kabupaten Pelalawan, tentang pengukuran kinerja pegawai kantor pertanahan. Menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat dalam penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan data menganalisanya sehingga diperoleh perumusan Analisa terhadap masalah yang dihadapi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Komplek Perkantoran Bhakti Praja Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian pada Kantor tersebut adalah adanya kinerja pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan yang kurang efektif.

C. Key Informan dan informan

Menurut Moleong (2005:3) key informan adalah mereka yang tidak hanya bisa memberikan keterangan tentang sesuatu kepada penelitian, tetapi juga bisa memberi sasaran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan sedangkan menurut Moleong (2005:90), informan adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang latar penelitian dan bersedia untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Tabel III.1: Key Informan dan Informan

No	Informan	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
1.	Darusman	Kepala Desa	SLTA	Key Informan
2.	Muftika Jufri, A. Ptnh	Ketua Adjudikasi PTSL	Stara Satu (S1)	Informan
3.	M.Ilham Aflah Arlym, S.H., M.Kn	Subseksi Pendaftaran Hak Tanah	Magister (2)	Informan
4.	Desi Ratna Sari	Masyarakat	SLTA	Informan
5.	Indri yani	Masyarakat	SLTA	Informan

Sumber : *Data Olahan Penulis 2020.*

Sedangkan Teknik Penarikan Informan yang penelitian gunakan adalah Teknik Snowball Sampling.

Snowball Sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka penelitian mencari orang lain yang

dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Dalam penelitian ini data diperoleh dari jawaban responden yang ada di Kantor Pertanahan terhadap wawancara pengisian kuensioner yang disampaikan langsung oleh si penulis.

2. Data skunder

Yaitu data yang di peroleh melalui sumber data berupa buku literature dan lapor penelitian sebelumnya seperti junal, buku, majalah dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data tersebut di peroleh dari Kantor Pertanahan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Jurnal Pertanahan dan literature lain yang membahas mengenai materi penelitian berupa peta, data jumlah pengunjung, data organisasi atau pemerintahan dan data pendukung lainnya yang di anggap dapat mendukung penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Banyak teknik yang dapat di gunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data pada prinsipnya berfungsi untuk mengungkapkan variable yang akan di teliti. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah:

1. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada pengelola wisata bahari. Adapun yang ditanyakan dalam wawancara ini guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian mengenai permasalahan dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisa Data

Berdasarkan analisis data dalam penelitian menggunakan teknik kualitatif yaitu data informan yang berbentuk kalimat variable dan data kualitatif dapat diperoleh melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan dapat diperoleh secara langsung (lapangan) yang akan dikumpulkan sesuai dengan indikator penelitian serta diuraikan untuk menarik kesimpulan.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2: Jadwal Waktu Penelitian Tentang Kinerja Kantor Pertanahan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pelalawan.

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2019-2020 Bulan dan minggu ke.....															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Up	x	x	x	X	x											
2	Seminar Up					x	x										
3	Revisi Up						x	x									
4	Revisi Kuesioner						x	x	x								
5	Rekomendasi survey							x	x	x							
6	Survei Lapangan									x	x	x	x	x			
7	Analisis Data													x	x	X	
8	Penyusunan Lapangan Hasil Penelitian (Skripsi)													x	X	x	
9	Konsultasi Revisi Skripsi															x	x
10	Ujian Konfrehensif Skripsi																x
11	Revisi Skripsi																x
12	Pengadaan Skripsi																x

Sumber Data: Modifikasi Penelitian 2020.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

1. Keadaan Geografis Kabupaten Pelalawan

Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar Kesadaran dan Kebulatan Tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga-Lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik Pandai dan Alim Ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.

Kabupaten Pelalawan dengan luas 13.924,94 km², diberikan oleh aliran Sungai Kampar, serta pada kawasan ini menjadi pertama dari Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kamapar Kiri . Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relayif besar yaitu: Pulau Mendol, Pulau Serapung dan Pulau Muda serta pulau-pulau yang tergolong kecil seperti: Pulau Tugau, Pulau Labuh, Pulau Baru Pulau Ketam, dan Pulau Untut.

\Stuktur wilayah merupakan daratan rendah dan bukit-bukit, dataran rendah membentang ke arah timur dengan luas wilayah mencapai 93% dari total keseluruhan. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organic, air tanahnya payau, kelembaban dan temperature udara agak tinggi.

1. Di bagian utara Pelalawan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Di bagian Timur Kabupaten Karimun dan Kabupaten Indragiri Hilir
3. Di bagian Selatan Kabupaten Kuantan Singingi dan Pasir Penyus Indragiri Hulu
4. Di bagian Barat Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru

Kabupaten Pelalawan merupakan pemekaran Kabupaten Kampar, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999. Pada awalnya terdiri atas 4 wilayah kecamatan, yakni: Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Kemudian setelah terbit Surat Dirjen PUOD No.138/1775/PUOD tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (Sembilan) Kecamatan, yang terdiri atas 4 Kecamatan induk dan 5 Kecamatan pembantu, tetapi berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kecamatan Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 (Sepuluh) Kecamatan. Namun, setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, maka Kabupaten Pelalawan terdiri atas 12 Kecamatan.

2. Keadaan Penduduk Kota Pelalawan

Masalah penduduk di kota Pelalawan sama halnya seperti daerah lain di Indonesia, untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang terkendali akan sulit dicapai.

Berikut merupakan distribusi data mengenai jumlah penduduk merupakan jenis kelamin di dua belas Kecamatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk dan Kecamatan di Kabupaten Pelalawan

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1.	Langgam	15.370	14.427	29.797	107
2.	Pangkalan Kerinci	56.843	54.542	111.385	104
3.	Bandar Sei Kijang	16.506	15.402	31.908	107
4.	Pangkalan Kuras	29.595	28.175	57.770	105
5.	Ukui	20.320	18.444	38.764	110
6.	Pangkalan Lesung	16.109	15.038	31.147	107
7.	Bunut	7.596	7.475	15.071	102
8.	Pelalawan	10.043	9.171	19.214	110
9.	Bandar Petalangan	7.068	7.038	14.106	100
10.	Kuala Kampar	9.182	8.837	18.019	104
11.	Kerumutan	11.880	11.407	23.287	104
12.	Teluk Meranti	8.506	8.280	16.786	103
Jumlah		209.018	198.236	407.254	105

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, 2017.

B. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Pelalawan

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pertanahan Program Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap

Tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18).

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintah bidang tata ruang
3. Pelaksanaan, Pelayanan, Pembinaan, dan Pengendalian urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang
5. Pelaksanaan kesekretariatan kantor, dan
6. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Presiden sesuai tugas dan fungsinya dan /atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Kepala Kantor

Kepala Kantor selaku Satuan Kerja Perangkat Kantor mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Kantor sesuai dengan kewenangannya.

ii. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan pegawai, urusan keuangan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas suatu organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Kantor Pertanahan dan Tata Ruang
2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan
3. Pelaksanaan urusan umum
4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian
5. Pelaksanaan Urusan Keuangan
6. Pelaksanaan urusan Perencanaan dan evaluasi
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Kantor Pertanahan dan Tata Ruang dan
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Kantor Pertanahan dan Tata Ruang

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuanagn, Perencanaan dan Evaluasi

-Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian dipimpin oleh kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Sub bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Sub bagian Umum dan Kepegawaian
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian
3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan
4. Pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan
5. Pengelolaan dokumentasi dan informasi
6. Penyusunan perencanaan kebutuhan pengembangan dan pembinaan pegawai
7. Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian dan
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sub bagian Umum dan Kepegawaian

-Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

Sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Sub bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan urusan perencanaan dan evaluasi.

Sub bagian Keuangan , Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Sub bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
2. Peremusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi
3. Pengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Kantor Peranahan dan Tata Ruang
4. Pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelapor keuangan
5. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Kantor Pertanian dan Tata Ruang dan
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sub bagian Keuanagn, Perencanaan dan Evaluasi

BIDANG PERTANAHAN

Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan pertanahan, fasilitasi pemanfaatan pertanahn dan fasilitasi penyelesaian sangketa pertanahan.

Bidang Pertanian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana Kerja Bidang Pertanian
2. Perumusan kebijakan teknis penatausahaan pertanahn, fisilitasipemanfaatan pertanahn dan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan
3. Perlaksanaan dan pembinaan penatausahaan pertanahan
4. Fasilitasi pemanfaatan pertanahn
5. Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahn dan

6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang
Pertanahan

Bidang Pertanahan terdiri dari :

1. Seksi Penatausahaan Pertanahan
2. Seksi Pemanfaatan Pertanahan dan
3. Seksi Sengketa Tanah

-Seksi Penatausahaan Pertanahan

Seksi Penatausahaan Pertanahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan Kerja Seksi Penatausahaan Pertanahan
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penatausahaan pertanahan
3. Pelaksanaan inbentarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan fasilitasi pendaftaran tanah dan
4. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Penatausahaan Pertanahan

-Seksi Pemanfaatan Pertanahan

Seksi Pemanfaatan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan tanah desa.

Seksi Pemanfaatan Pertanahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemanfaatan Pertanahan
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi pemanfaatan pertanahan

3. Pembinaan pemanfaatan tanah desa
4. Penyusunan rekomendasi pemanfaatn dan pelepasan tanah desa
5. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimal dan *Absentee* dan
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pemanfaatan Pertanahan

-Seksi Sengketa Tanah

Seksi Sengketa Tanah mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan.

Seksi Sengketa Tanah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Sengketa Tanah
2. Perumusan kebijakan teknis fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan
3. Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan
4. Fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum dan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Sengketa Tanah

D. Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan

Visi

Untuk itu Kantor Pertanahan telah menetapkan Visi yang selaras dengan keadaan lingkungan serta perubahan-perubahan yang, dan selaras dengan Visi induk organisasinya. Kabutuhan akan Visi yang berorientasi jauh kedepan menjadi hal yang mutlak untuk mencapai hasil yang akan diraih organisasi.

Visi Kantor Pertanahan adalah : MENJADI LEMBAGA YANG MAMPU MEWUJUDKAN TANAH DAN PERTANAHAN UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT, SERTA KEADILAN DAN BERKELANJUTAN SISTEM KEMASYARAKATAN, KEBANGSAAN DAN KENEGARAAN.

Misi

Dalam usaha tercapainya Visi tersebut diatas, Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan serta pemantapan ketahanan pangan.
2. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hokum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
3. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luas nya generasi yang akan dating terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat, dan.

4. Penguatan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang terutang UPPA dan aspirasi rakyat secara luas untuk mencapai tujuan pembangunan bidang pertanahan yaitu, "Mengelola tanah seoptimal mungkin untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam melakukan sebuah penelitian sangat penting dijelaskan mengenai identitas informan penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian itu adalah hasilnya dapat di pertanggung jawaban karena penelitian yang jelas pasti telah sesuai dengan substansi penelitian.

Dalam penelitian tentang Kinerja Kantor Pertanahan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci ini penulis akan menjelaskan mengenai identitas informasi yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia informan.

1. Identitas Key informan dan informan

Tabel : V.1 Identitas Key Informan dan informan Penelitian Menulis Tentang kinerja Kantor Pertanahan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Pelalawan.

No	Informan	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
1.	Darusman	Kepala desa	SLTA	Key Informan
2.	Muftika Jufri, A. Ptnh	Ketua Adjudikasi PTSL	Stara Satu (S1)	Informan
3.	M.Ilham Aflah Arlym, S.H., M.Kn	Subseksi Pendaftaran Hak Tanah	Magister (S2)	Informan
4.	Desi Ratna Sari	Masyarakat	SLTA	Informan
5.	Indri Yani	Masyarakat	SLTA	Informan

Sumber : Data Olahan Penelitian di Lapangan 2020.

2. Tingkat Pendidikan

Tabel : V.2 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Magister (S2)	1
2.	Stara Satu (1)	1
3.	SLTA	3
Jumlah		5

Sumber : Data Olahan Penelitian di Lapangan 2020.

Dalam table diatas diketahui bahwa sumber daya manusia ditingkat pendidikan dalam penelitian ini bervariasi, mulai dari Magister (S2) berjumlah 1 orang, Stara Satu (S1) berjumlah 1 orang , SLTA 3 orang, jadi jumlah keseluruhan sumber daya manusia di tingkat pendidikan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, dan dapat disimpulkan bahwa yang mendominasi dalam penelitian ini yaitu pada pendidikan Stara Satu (S1) yang berjumlah 1 orang.

3. Tingkat Umum Informasi

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat kaitannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau tua umur seseorang maka akan cenderung semakin berperan pengalamannya dalam menentukan keputusan untuk bertindak dibandingkan dengan umur yang lebih muda.

Dalam penelitian ini keberagaman usia informan, mulai dari yang termuda yaitu tahun sampai tahun. Adapun usia informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel : V.3 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah
1.	20-30	2
2.	31-40	1
3.	41-50	2
Jumlah		5

Sumber : Data Olahan Penelitian Di Lapangan 2020.

Dari table diatas dapat dilihat bahwa responden yang berumur 20-30 tahun adalah sebanyak 2 orang, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 1, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 2 orang. Jadi dari gambaran diatas dapat diketahui bahwa rata responden dalam penelitian ini relative sudah dewasa yaitu 5 orang yang dijadikan responden sebanyak 1 orang sudah berumur 31-40 tahun.

4. Jenis Kelamin Informan

Jenis kelamin dalam sebuah penelitian tidaklah berpegangaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruh jenis kelamin informan pada hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bias menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah. Adapun jenis kelamin informan adalah sebagai berikut ini :

Tabel : V.4 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3
2.	Perempuan	2
Jumlah		5

Sumber : Data Olahan Penelitian Di Lapangan 2020.

Berdasarkan table diatas dapat kita lihat bahwa jumlah infoman laki-laki lebih banyak yaitu 3 orang sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang.

Sehingga jika dilihat identitas informan yang telah penulis jabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa informan yang digunakan dalam penelitian ini cukup berkompeten untuk memberikan informan yang penulis butuhkan dalam menjawab masalah penelitian ini.

B. Kinerja Kantor Pertanahan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pelalawan

Pada dasarnya Kinerja suatu proses atau hasil pengembangan pemanfaatan suatu sumber daya telah ada sebelumnya sehingga memiliki nilai yang lebih, terlebih lagi dalam pengembangan Kinerja Kantor maka dibutuhkannya Kinerja yang sangat baik untuk dapat terciptanya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang banyak di minati oleh masyarakat karena gratis khususnya Masyarakat yg kurang mampu.

Adapun indikator-indikator dalam Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai berikut:

1. Kuantitas Pekerjaan (*Quantity Of Work*)
2. Kualitas Pekerjaan (*Quality Of Word*)
3. Pengetahuan mengenai pekerjaan (*Job Knowledge*)
4. Gagasan (*Greativenes*)
5. Kerjasama (*Cooperation*)
6. Kesadaran (*Initiative*)
7. Prakarsa (*Depandability*)
8. Kualitas Pribadi (*Personal Qualities*)

Dalam penelitian ini dilakukan pembahasan satu persatu dari setiap indikator yang telah di lampirkan di atas agar data yang di hasilkan dapat secara mudah dipahami.

1. Kuantitas Pekerjaan (*Quantity Of Work*)

Menurut Wungsu & Brotoharsojo (2003), kuantitas adalah segala macam bentuk satuan ukuran yang berhubungan dengan jumlah hasil kerja yang dapat dinyatakan ukuran angka atau padanan angka lainnya.

Hasil wawancara pada tanggal 26 November 2020 jam 09.00 tentang berapa banyakkah sertipikat yang harus selesai dalam satu hari wawancara dengan Bapak Darusman selaku Kepala Desa dan sebagai Key Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Seberapa sanggupnya, kalau pekerjaan tidak banyak mungkin bisa terselesaikan”.

Hasil wawancara pada tanggal 16 Juli 2020 jam 11.00 tentang berapa banyakkah sertipikat yang harus selesai dalam satu hari wawancara dengan Bapak

Muftika Jufri Ketua Adujikasi PTSL sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Kalau sekarang seberapa sanggup saja, karena banyak proyek yang kami kerjakan. Kadang bisa juga ratusan dalam 1 hari bisa juga lebih”.

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2020 jam 09.00 dengan Bapak M. Ilham Aflah Arlym selaku Pegawai di Kantor Pertanahan sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Bisa ratusan dalam 1 hari bisa juga lebih, tetapi yang harus diselesaikan dalam 1 hari itu seberapa sanggup kami saja dek”.

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2020 jam 10.00 dengan Ibu Desi Ratna Sari selaku Masyarakat dan sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Kurang tau dek, seberapa jumlah sertipikat yang harus di selesaikan dalam 1 hari”.

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2020 jam 11.00 dengan Ibu Indri Yani selaku Masyarakat dan sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Kemungkinan banyak sertipikat yang selesai dalam satu 1, tapi saya kurang tau juga dek”

Dari wawancara diatas dapat dianalisis bahwa sekarang seberapa sanggup saja, karena banyak proyek yang kami kerjakan, terkadang bisa juga ratusan sertipikat yang selesai dalam 1 hari.

Berdasarkan hasil Observasi penulis dilapangan Kantor Pertanahan, kinerja sudah berjalan dengan lancar melalui Program Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap. Hanya saja Masyarakat kurang mengetahui seberapa banyak target sertipikat yang harus diselesaikan dalam 1 hari.

Kesimpulan yang dapat penulis lihat dari indikator Kuantitas Pekerjaan adalah untuk menyelesaikan sertipikat tanah dalam 1 hari bisa ratusan bisa juga lebih, tetapi untuk sekarang mereka banyak proyek yang dikerjakan makanya dalam 1 hari itu cuman bisa seberapa sanggup saja yang kerjakan, apabila tidak banyak proyek yang dikerjakan kemungkinan bisa lebih dari ratusan.

2. Kualitas Pekerjaan (*Quality Of Word*)

Kualitas adalah taraf/tingkat baik buruknya/derajat sesuatu. Menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003;57), kualitas dinyatakan dalam suatu ukuran yang dapat dipadang dengan angka.

Mutu seorang karyawan/pegawai dalam hal melaksanagn tugas-tugasnya meliputi sebagai berikut, menurut (Wilson dan Heyel:1987).

1. Kesesuaian adalah antara rencana kerja dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
2. Kerapian adalah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya dan
3. Kelengkapan adalah ketelitian dalam melaksanakan pekerjaanya.

Hasil wawancara pada tanggal 26 November 2020 jam 09.00 tentang ketelitian kerja pegawai dalam menyelesaikan tugas, penelitian melakukan wawancara dengan Bapak Darusman selaku Kepala Desa dan sebagai Key Informan Pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Sebagai pegawai harus teliti dalam pekerjaan yang dilakukan”

Hasil wawancara pada tanggal 16 Juli 2020 jam 11.00 tentang ketelitian kerja pegawai dalam menyelesaikan tugas, penelitian melakukan wawancara dengan Bapak Muftika Jufri Ketua Adjudikasi PTSL sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Karena pekerjaan kami ini dek, ada kaitannya dengan hukum maka harus sangat teliti untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan karena efeknya melanggar hukum bisa masuk penjara”.

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2020 jam 09.00 dengan Bapak M. Ilham Aflah Arlym, S.H., M.Kn selaku Pegawai di Kantor Pertanahan sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Kami harus sangat teliti dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan karena pekerjaan kami ini bersangkutan dengan hukum, kalau kami tidak teliti dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kami bisa masuk penjara”.

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2020 jam 10.00 dengan Ibu Desi Ratna Sari selaku Masyarakat dan sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan.

“Menurut Ibu pegawai Kantor Pertanahan ini sangat teliti dalam pembuatan sertipikat-sertipikat yang sudah selesai contohnya sertipikat Ibu sendiri yang sudah selesai”.

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2020 jam 11.00 dengan Ibu Indri Yani selaku Masyarakat dan sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Menurut Ibu sendiri mereka mengerjakan tugasnya sangat teliti dalam pembuatan sertipikat”.

Dari wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pekerjaan ini ada kaitannya sama hukum apabila tidak teliti dalam mengerjakan pekerjaan atau tugas-tugas yang diberikan maka bisa masuk penjara.

Berdasarkan hasil Observasi penulis dilapangan pekerjaan ini dikata kan sangat berjalan dengan baik dan sangat teliti dalam mengerjakan pekerjaan dan tugas-tugas yang diberikan.

Kesimpulan yang dapat penulis lihat dari indikator Kualitas Pekerjaan adalah pekerjaan ini ada kaitannya sama hukum aapabila tidak teliti dalam mengerjakan pekerjaan atau tugas-tugas yang diberikan maka bisa masuk penjara dan dihukum.

3. Pengetahuan mengenai pekerjaan (*Job Knowledge*)

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan dan berfikir yang menjadi dasar manusia Pius dalam kamus bahasa Indonesia (2001) pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui dan proses belajar.

Hasil wawancara pada tanggal 26 November 2020 jam 09.00 tentang bagaimana pengetahuan mengenai pekerjaan yang dimiliki selama bekerja pada Kantor Pertanahan peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Darusman selaku Kepala Desa dan sebagai Key Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Yang saya ketahui tentang pekerjaan dikantor pertanahan itu cuman sedikit”.

Hasil wawancara pada tanggal 16 Juli 2020 Jam 11.00 tentang bagaimana pengetahuan mengenai pekerjaan yang dimiliki selama bekerja pada Kantor Pertanahan peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muftika Jufri Ketua Adjudikasi PTSL dan sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Alhamdulillah, saya cukup mengetahui tentang pekerjaan ini apa lagi dalam Program PTSL ini sendiri dikarenakan memang dalam bidang saya”.

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2020 Jam 09.00 dengan Bapak M. Ilham Aflah Arlyam selaku Pegawai di Kantor Pertanahan sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Ya tentu saja saya mendapatkan pengetahuan dari pekerjaan yang saya kerjakan di Kantor Pertanahan ini contoh seperti pembuatan sertipikat tanah”.

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2020 Jam 10.00 dengan Ibu Desi Ratna Sari selaku Masyarakat dan sebagai Indorman pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Saya tidak tau dek seberapa besar pengetahuan yang mereka miliki selama bekerja di Kantor Pertanahan ini, soalnya saya tidak pernah bertanya sama mereka”.

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2020 jam 11.00 dengan Ibu Indri Yani selaku Masyarakat dan sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Saya kurang paham dek tentang pengetahuan yang mereka miliki selama bekerja di Kantor Pertanahan itu”.

Dari wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pegawai cukup mengetahui mengenai pekerjaan dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan pembuatan sertipikat tanah.

Berdasarkan hasil Observasi penulis dilapangan dapat dilihat semua pegawai cukup tahu tentang pekerjaan yang mereka miliki selama bekerja di kantor Pertanahan. Tetapi Masyarakatnya kurang mengetahui tentang pengetahuan pegawai dalam berkerja di Kantor Pertanahan tersebut.

Kesimpulan yang dapat penulis lihat dari indikator Pengetahuan mengenai pekerjaan adalah semua pegawai yang berkerja di Kantor Pertanahan sudah cukup tahu mengenai pekerjaan yang mereka miliki selama bekerja di Kantor Pertanahan.

4. Gagasan (*Greativenes*)

Gagasan/ide adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Artinya sama dengan cita-cita. Gagasan dalam kajian Filsafat Yunani maupun Filsafat Islam menyangkut suatu gambaran imajinal utuh yang melintas cepat.

Menurut Wikipedia, Gagasan atau ide adalah istilah yang dipakai baik secara populer maupun dalam bidang filsafat dengan pengertian umum “atau “pengertian”.

Gagasan tentang sendok, muncul dalam bentuk sendok yang utuh di pikiran. Selama gagasan belum dituangkan menjadi suatu konsep dengan tulisan maupun gambar yang nyata, maka gagasan masih berada di dalam pikiran. Gagasan menyebabkan timbulnya konsep, yang merupakan dasar bagi segala

macam pengetahuan, baik sains maupun filsafat. Sekarang banyak orang percaya bahwa gagasan adalah suatu kekayaan intelektual seperti hak cipta atau paten.

Hasil wawancara pada tanggal 26 November 2020 Jam 09.00 tentang seperti apakah memberikan gagasan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan penelitian melakukan wawancara dengan Bapak Darusman selaku Kepala Desa dan sebagai Key Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Mungkin melalui Informasi dan diskusi di Kantor”.

Hasil wawancara pada tanggal 16 Juli 2020 Jam 11.00 tentang seperti apakah memberikan gagasan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muftika Jufri Ketua Adjudikasi PTSL sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Melalui diskusi dan menyatakan dengan sederhana dan ringkas contoh seperti menulis kegiatan, menyampaikan pesan atau Informasi melalui media”.

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2020 Jam 09.00 dengan Bapak M. Ilham Aflah Arlym selaku Pegawai di Kantor Pertanahan sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Melalui rapat dan menjelaskan dengan kalimat sendiri contoh seperti menulis, menyebarkan Informasi melalui media kertas, buku, blog dan lain sebagainya”.

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2020 Jam 10.00 dengan Ibu Desi Ratna Sari selaku Masyarakat dan sebagai Informasi pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Mungkin melalui diskusi secara ringkas dan dapat dimengerti”.

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2020 Jam 11.00 dengan Ibu Indiri Yani selaku Masyarakat dan sebagai Informasi pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Mungkin marekan melalui Rapat dek”.

Dari wawancara diatas dapat dianalisis bahwa Pegawai Kantor Pertanahan memberikan gagasan atau ide kreatif dan inovatif di Kantor Pertanahan di Kabupaten Pelalawan supaya pekerjaan cepat selesai.

Berdasarkan hasil Observasi penulis di lapangan semua pegawai dapat memberikan ide dengan sangat terlaksana dan berjalan dengan baik.

Kesimpulan yang dapat penulis lihat dari indikator Gagasan adalah semua pegawai di Kantor Pertanahan memberi gagasan atau ide kreatif dan inovatif supaya pekerjaan cepat selesai.

5. Kerjasama (*Cooperation*)

Pengertian kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama bisa terjadi ketika individu-individu yang bersangkutan mempunyai kepentingan dan kesadaran yang sama untuk bekerjasama untuk mencaapi tujuan dan kepentingan bersama.

Hasil wawancara pada tanggal 26 November 2020 Jam 09.00 tentang siapa saja bekerjasama dalam mengembangkan aspek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pelalawan penelitian melakukan wawancara dengan Bapak Darusman selaku Kepala Desa dan sebagai Key Informan di dalam penelitian ini beliau mengatakan:

“Kemungkinan banyak yang ikut kerjasama dalam mengembangkan aspek Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap Pertama Pemda, Kedua Pemerintah Daerah, Ketiga Kejaksaan, Keempat Polisi dan Kelima TNI”.

Hasil wawancara pada tanggal 16 Juli 2020 Jam 11.00 tentang siapa saja bekerjasama dalam mengembangkan aspek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pelalawan penelitian melakukan wawancara dengan Bapak Muftika Jufri Ketua Adjudikasi PTSL sebagai Informan di dalam penelitian ini beliau mengatakan:

“Banyak pihak yang ikut serta dalam pengembangan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pertama Pemda, kedua Pemerintah Daerah, ketiga Kejaksaan, keempat polisi dan kelima TNI. Semua bekerjasama dalam meningkatkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, tetapi yang paling sering bekerjasama dengan pihak Kejaksaan”.

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2020 Jam 09.00 dengan Bapak M. Ilham Aflah Arlym selaku pegawai di Kantor Pertanahan sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Yang ikut serta dalam pengembangan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pihak Pemda, Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Polisi dan TNI, mereka saling bekerjasama dalam pengembangan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”.

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2020 Jam 10.00 dengan Ibu Desi Ratna Sari selaku Masyarakat dan sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Setahu saya Pemda , Kejaksaan Dan Pemerintah Daerah, yang lain nya saya kurang tau dek”.

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2020 jam 11.00 dengan Ibu Indri Yani selaku Masyarakat dan sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Setahu saya sih dek Polisi, TNI dan Pemerintah Daerah selebihnya ibu tidak tau dek”.

Dari wawancara diatas dapat dianalisis bahwa yang pernah bekerjasama di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan untuk memajukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bersama dengan pihak, Pemda, Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Polisi dan TNI.

Berdasarkan hasil Observasi penulis di lapangan dapat dilihat yang bekerjasama untuk meningkatkan aspek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bersama pihak Pemda, Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Polisi dan TNI sudah berjalan dengan baik.

Kesimpulan yang dapat penulis lihat dari indikator Kerjasama adalah pihak yang berkerjasama untuk meningkatkan aspek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pihak Pemda, Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Polisi dan TNI supaya Program Pendaftaran Tanah berjalan dengan baik.

6. Kesadaran (*Dependability*)

Menurut Hasibuan (2012;193), “kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , “kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengenai, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan kesadaran adalah kondisi dimana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankannya.

Hasil wawancara pada tanggal 26 November 2020 Jam 09.00 tentang mengenai tingkat kehadiran selama bekerja di Kantor Pertanahan peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Darusman selaku Kepala Desa dan sebagai Key Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Setahu Bapak tingkat Kehadiran itu terlalu disiplin apa lagi dalam hal masuk kerja”.

Hasil wawancara pada tanggal 16 Juli 2020 Jam 11.00 tentang mengenai tingkat kehadiran selama bekerja di kantor pertanahan peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mufrika Jufri Ketua Adjudikasi PTSL sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan :

“Kalau tingkat kehadiran kami di Kantor selalu hadir tepat waktu dan apabila ada keperluan diluar kami harus memintak izin terlebih dahulu kepada ketua. Sempat ada keterlambatan hadir untuk masuk maka kami akan di hukum berdiri ditiang bendera selama 1 jam”.

Sedangkan Hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2020 Jam 09.00 dengan Bapak M. Ilham Aflah Arlym selaku pegawai di Kantor Pertanahan sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Tingkat kehadiran kami, selalu tepat waktu dan apabila ada keterlambatan datang maka kami akan dihukum berdiri ditiang bendera selama 1 jam”.

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2020 Jam 10.00 dengan Ibu Desi Ratna Sari selaku Masyarakat dan sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Mungkin mereka masuk tempat waktu, apabila ada yang terlambat masuk maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman”.

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2020 Jam 11.00 dengan Ibu Indri Yani selaku Masyarakat dan sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Kemungkinan dalam keterlambatan masuk jam kerja tempat waktu”.

Dari wawancara diatas dapat dianalisis bahwa tingkat kehadiran di Kantor Pertanahan selalu hadir tepat waktu dan apabila ada keperluan diluar, maka harus memintak izin terlebih dahulu kepada ketua. Apabila ada yang telambat masuk dan tidak memintak izin kepada ketua terlebih dahulu maka akan dikatakan terlambat masuk kantor dan akan menerima sanksi dan hukuman yang telah di tetapkan”.

Berdasarkan hasil Observasi penulis dilapangan dapat dilihat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan sudah memberikan Sanksi dan Hukuman untuk pegawai yang terlambat masuk kerja. Tetapi pegawai sering melanggar Sanksi dan hukuman tersebut maka penulis mengatakan tingkat kehadiran pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan sangat lemah.

Kesimpulan yang dapat penulis lihat dari indikator Kesadaran adalah tingkat kehadiran pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan sangat lemah. Sedangkan di Kantor sudah membuat Sanksi dan Hukuman tetapi masih sering di langgar.

7. Pralarsa (*Initiative*)

Daya untuk melakukan suatu pekerjaan tanpa menunggu intervensi atau suruhan orang lain. Karyawan yang mempunyai inisiatif adalah karyawan yang

proaktif dan tidak pasif yang diam menunggu perintah atasan. Pegawai yang berinisiatif tidak akan menunggu perintah dahulu untuk berbuat, mereka berbuat melebihi dari yang diperintahkan. Selalu mencari terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan hasil pekerjaan. Orang-orang seperti ini sangat disukai dalam bidang apapun yang digeluti karena hasil pekerjaan mereka melebihi dari yang diharapkan.

Hasil wawancara pada tanggal 26 November 2020 Jam 09.00 tentang adakah Pegawai Kantor diberikan kesempatan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas pada tepat waktunya penelitian melakukan wawancara dengan Bapak Darusman selaku Kepala Desa dan sebagai Key Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Mungkin ada dek”.

Hasil wawancara pada tanggal 16 Juli 2020 Jam 11.00 tentang adakah Pegawai Kantor diberikan kesempatan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas pada tepat waktunya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muftika Jufri Ketua Adjudikasi PTSL sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Ada sih dek, dalam rangka kecepatan kegiatan PTSL ini kita ada banko yang dikasih sama Masyarakat. Kalau Masyarakat mengisi satu persatu kan menjadi sulit, kita membantu bernovasi mensit namanya. Blanko itu kita masukan dulu ke sistem kita print data. Pas sudah di print sudah terisi semua, jadi pekerjaan menjadi lebih cepat. Masyarakat memohon dan mengisi saja sedangkan mengisi blanko bisa mencampai 15 menit lamanya”.

Sedangkan hasil wawancara 17 Juli 2020 Jam 09.00 dengan Bapak M. Ilham Aflah Arlym selaku pegawai di Kantor Pertanahan sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Ada dek, dalam rangka kecepatan kegiatan PTSL ada namanya mensit, blanko kita masukan dulu ke sistem terus kita print data. Data sudah terisi semua jadi pekerjaan menjadi lebih cepat”.

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2020 Jam 10.00 dengan Ibu Desi Ratna Sari selaku Masyarakat dan sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Menurut saya ada, tetapi dengan cara membantu Masyarakat untuk mengisi blanko supaya cepat”.

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2020 Jam 11.00 dengan Ibu Indri Yani selaku Masyarakat dan sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Mungkin ada dek tetapi tidak tau dengan cara seperti apa”.

Dari wawancara diatas dapat dianalisis bahwa Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan sudah memberi kesempatan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan supaya cepat selesai.

Berdasarkan hasil Observasi penulis dilapangan dapat dilihat bahwa di Kantor Pertanahan sudah sangat bagus dan lebih Kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.

Kesimpulan yang dapat penulis lihat dari indikator Pralarsa adalah Pegawai sudah diberikan kesempatan untuk lebih kreatif dan inovatif dan menyelesaikan tugas-tugas supaya cepat selesai.

8. Kualitas Pribadi (*Personal Qualities*)

Menurut Koentjaraningrat Kepribadian adalah beberapa ciri watak yang diperlihatkan seseorang secara lahir, konsisten, dan konsumien. Setiap manusia melakukan proses sosial. Proses sosialisasi berlangsung selama manusia masih hidup didunia ini. Kepribadian seseorang individu dapat terbentuk dalam bertingkah laku, sehingga individu memiliki identitas khusus yang berbeda dengan orang lain.

Sedangkan menurut Theodore R Newcombe ahli sosiologi mengatakan kepribadian ialah organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang latar belakang terhadap prilaku.

Hasil wawancara pada tanggal 26 November 2020 Jam 09.00 tentang faktor kepribadian hanya boleh diatur oleh individu atau pegawai penelitian melakukan wawancara dengan Bapak Darusman selaku Kepala Desa dan sebagai Key Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Kepribadian itu ya masing-masing apa lagi kepribadian Individu”.

Hasil wawancara pada tanggal 16 Juli 2020 Jam 11.00 tentang faktor kepribadian hanya boleh diatur oleh individu atau pegawai penelitian melakukan wawancara dengan Bapak Muftika Jufri Ketua Adjudikasi PTSL sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Kepribadian masing-masing ya sesuai individu, tetapi sempat ada yang jelek kepribadiannya kepala kantor sendiri yang langsung memanggil dan ditegur”.

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2020 Jam 09.00 dengan Bapak M. Ilham Aflah Arlym selaku pegawai di Kantor Pertanahan sebagai Informan pada Penelitian ini beliau mengatakan:

“Setahu Bapak kepribadian masing-masing sesuai individu-individu sendiri dek yang mengatur, tetapi sempat ada yang jelek kepribadiannya maka langsung di panggil sama kepala kantor”.

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2020 Jam 10.00 dengan Ibu Desi Ratna Sari selaku Masyarakat dan sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Setahu Ibu kepribadian di atur individu-individu, tetapi sempat ada yang jelek kepribadiannya maka di tegur sama pimpinan atau kepala kantor”.

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2020 Jam 11.00 dengan Ibu Indri Yani selaku Masyarakat dan sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

“Kepribadian itu di atur individu apabila kepribadian kita tidak baik ya mungkin akan ditegus sama pimpinan”.

Dari wawancara diatas dapat dianalisis bahwa kepribadian diatur oleh individu-individu sendiri dan apabila kepribadiannya jelek maka akan ditegur atau dipanggil sama kepala Kantor untuk diperingati.

Berdasarkan hasil Observasi penulis dilapangan dapat dilihat Kepribadian di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan sudah sangat baik.

Kesimpulan yang dapat penulis lihat dari indikator Kualitas Pribadi adalah kepribadian itu memang individu. Apabila kepribadiannya jelek maka akan ditegur atau diperingati oleh ketua.

Hambatan-Hambatan dalam Kinerja Kantor Pertanahan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pelalawan

Dalam penelitian penulis lakukan ini yang menjadi hambatan dalam Kinerja Kantor Pertanahan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, makanya target sertipikat banyak tidak terselesai karena banyak proyek yang dikerjakan
- b. Kurangnya kedisiplinan Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dalam keterlambatan masuk kerja
- c. Kurangnya ide/gagasan Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dalam hal pekerjaan yang dimiliki

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai analisis Kinerja Kantor Pertanahan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pelalawan penelitian dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Kurangnya pegawai dikantor pertanahan, makanya target sertipikat banyak tidak selesai dikarenakan banyak proyek yang dikerjakan.
2. kerjasama berjalan dengan baik karena tidak ada kendala sama sekali untuk proses kerjasama. Pihak-pihak yang ikut kerjasama yaitu Pemda, Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Polisi dan TNI yang paling sering ikut kerjasama dengan kejaksaan.
3. Harus tepat waktu dalam kehadiran jam kerja yang ditetapkan, apa bila ada yang terlambat masuk akan di hukum berdiri ditiang bendera selama 1 jam.
4. Pegawai kantor diberikan kesempatan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pekerjaan supaya pekerjaan cepat selesai dan mempermudah masyarakat untuk mengurus sertipikat.
5. Kualitas Pribadi dapat dikatakan terlaksana ,tetapi apa bila ada kepribadian yang tidak baik/kurang ya tentu di panggil/ditegur sama pimpinan.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Disarankan Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan lebih ditingkatkan lagi, supaya tidak ada lagi target yang tidak terselesaikan.
2. Disaranakn Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan lebih disiplin lagi, supaya tidak ada lagi yang terlambat masuk kerja.
3. Disarankan Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan lebih ditingkatkan lagi dalam hal memberi ide/gagasan ,supaya pekerjaan cepat selesai.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku

- AA. Anwar Perabu Mangkunegara, (2009), *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Rosda.
- Agus Sartono. 2012. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi4. BPFE. Yogyakarta.
- Agustino Leo, 2008, "*Dasar-dasar Kebijakan*" Bandung, Alfabeta.
- Brotoharsojo, Hartanto & wungu, Jiwo 2003, *Tingkatkan Kinerja Perusahaan dengan Merit System*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- B.Uno Hamzah & Lamatenggo, 2012, *Teori Kinerja & Pengukurannya*.Gorontalo, Bumi Aksara.
- Cayani, Ati. 2005. *Stategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Indeks, Jakarta.
- Chatab Nevizond, 2007, *Profil Budaya Organisasi*, Bandung, Alfabeta.
- DR. Faustino Cardoso Gomes, M, Si. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta:Andi.
- George R. Terry Leslie W. Rue, 2001, *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta:PT. Bumi Aksara.
- Gibson, James L. 1997. *Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Hasibuan, Melayu, 2001. *Kinerja Dan Perstasi Kerja*, Jakarta. Gramedia.
- , M. 2003. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektivitas Dalam Kinerja*, Jakarta. Gramedia.
- Keban 2004. *Sistem Pemerintah Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara.

- Kurniawan, Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pemburuan.
- Labolo, Muhadam, 2007, *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Kepala Gading permai:Jakarta.
- Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson. 2014. *Contextual Teaching Learning*. Jakarta:Kaifa.
- Mangkunegara, Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung. Refika Aditama.
- Moenir, 2004. *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Moleong. Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung.
- Mondy R Wayne. 2008. *Manajenn Sumber Daya Manusia*. Jakarta:Elngga.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan) 1*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Salam, Dharma Setiyawan. 2005. *Manajemen pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sugiono, Dr., Prof., 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, Alfabel. Bandung.
- Syafiie. Inu Kencana, 2003. "*Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*" Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____,2005. *Pengaturan Ilmu Pemerintahan Bandung PT*. Refika Aditama.
- _____,2013, *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen Implikasi Pada Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2008), 118.
- Triton PB, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif Partnership dan Kolektivitas*, Tugu Publisher, Yogyakarta, Uzer Usman, Moh.
- Wasistono, Sadu, 2015 (*Metode Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi yang Diperluas*). Sumedang. Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Jatinangor.

Sumber Lain

<https://s.docworkspace.com/d/AETnGWOTyLoowoP2-8imFA>
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN.

<https://s.docworkspace.com/d/AB26WECTyLoo4oao0sKmFA>
M. Dani Fadhurrohman(14410121).

<https://www.atrbpn.go.id>
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALS BADAN
PERTANAHAN.

Dokumentasi

Buku Pedoman Penelitian Usulan Penelitian 2013 Pekanbaru, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Peraturan Nasional Nomor
4 Tahun 2015 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.